

Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya

jsb | jurnal
sejarah dan budaya

Book Review

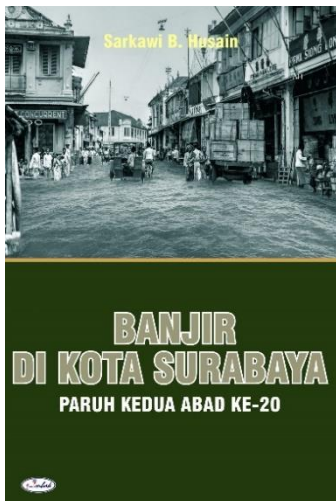
Journal homepage: <http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index>

Melihat banjir di Surabaya dari sudut pandang sejarah

Ahmad Sholehuddin Suryanullah

ahmadsholehuddinsuryanullah@mail.ugm.ac.id

Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia.



Judul buku:

Banjir di Kota Surabaya Paruh Kedua Abad ke-20

Penulis:

Sarkawi B. Husain

Penerbit:

Penerbit Ombak (2020)

Halaman:

xx+366

ISBN:

978-602-258-558-9

Harga Buku:

IDR. 125.000 (Soft Cover)

Kata “banjir” bagi masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi, banyak peristiwa banjir pada akhir-akhir ini, yang mana terjadi karena beberapa faktor, mulai dari kondisi alam dan manusianya. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya sudah mengalami permasalahan banjir sejak periode Kolonial, hal itu terjadi karena meningkatnya air laut, eksploitasi hutan, sedimentasi sungai, demografi yang tidak stabil, dan penimbunan wilayah resapan air. Sarkawi B. Husain dalam buku ini menelusuri latar belakang wilayah Kota Surabaya, faktor-faktor penyebab banjir, peristiwa terjadinya banjir, permasalahan demografi serta lingkungan, dan upaya untuk mengendalikan. Buku ini diangkat dari disertasinya di Universitas Gadjah Mada pada 2016.

Bagian pertama buku ini memaparkan bahwa kondisi geografis Kota Surabaya sebelum menjadi pemukiman yakni rawa-rawa, terbentuknya daratan di wilayah ini terpicu dari endapan material dari erupsi Gunung Kelud yang terbawa oleh aliran Sungai Brantas, kemudian teralir ke percabangan yaitu Sungai Pengirian dan Sungai Mas yang bermuara di Surabaya, proses ini terjadi selama ratusan tahun, sehingga mampu mengendap serta membentuk daratan. Tidak hanya itu, menurunnya air laut juga menjadi faktor terbentuknya daratan baru di Surabaya, sehingga banyak orang-orang yang mulai menghuni daerah ini. Pada bagian kedua menjelaskan tentang tidak adanya sistem drainase pada awal abad ke-19 di Kota Surabaya, hal itu semakin diperparah oleh naiknya air laut dan meluapnya sungai yang melintasi Kota Surabaya ketika musim hujan tiba. *Gemeente* hanya memperhatikan pemukiman Eropa saja, pemukiman pribumi tidak diperhatikan, mereka mengurus



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

banjirnya sendiri, tanpa mendapat bantuan dari pemerintah Kota Surabaya. Pasca memperoleh kedaulatan, masyarakat Kota Surabaya masih terbayang-bayang dengan bencana banjir, meskipun sudah dilakukan penataan sistem drainase, tetapi upaya tersebut belum maksimal, terlihat pada 1955 di beberapa wilayah masyarakat yang berdekatan dengan sungai, mereka melakukan protes dengan menjebol tanggul sungai, sehingga banjir semakin merata.

Berikutnya bagian ketiga memperlihatkan semakin masifnya banjir, yakni dengan bertambahnya wilayah yang terendam tahun 1970-an, dulu hanya terjadi di daerah bekas rawa, pada tahun ini mulai merambah ke wilayah yang lebih tinggi. Berdasarkan laporan dari kantor Humas Surabaya, banjir pada awal 1978 melanda 34 lokasi atau hampir separuh wilayah Surabaya, jalan-jalan serta fasilitas umum lainnya ikut terendam, sehingga menghambat aktivitas masyarakat dan menyebabkan kerugian materi. Menanggapi hal itu, Pemerintah Kota Surabaya tahun 1980-an menangani banjir dengan membeli pompa air dari Jepang, akan tetapi upaya itu masih kurang efektif, karena air yang menggenangi dengan jumlah pompanya tidak sebanding. Aksi premanisme juga terjadi pada pengendara mobil yang mogok, para pemuda mendorongnya dan meminta upah Rp. 1.000-Rp. 2.000, jika pengemudi tidak memberikan upah tersebut, mereka akan memecahkan kaca mobilnya. Sebagian perumahan yang baru berdiri ikut tergenang, penghuni perumahan menuntut ganti rugi ke pengembang, karena merasa tertipu.

Pada bagian keempat mengulas tentang meningkatnya penduduk yang diakibatkan dari semakin berkembangnya Pelabuhan Surabaya awal abad ke-20, puncaknya pada 1950-an, banyak masyarakat luar Surabaya datang ke Surabaya untuk mencari pekerjaan dan menetap di sana. Lonjakan demografi ini menjadi masalah serius, karena Pemerintah Kota Surabaya harus menyediakan hunian untuk mereka, meski sudah banyak pembangunan perumahan sederhana, tetapi para pendatang tidak semua bisa tertampung, maka dari itu, banyak bermunculan bangunan liar di tanah-tanah pemerintah dan bantaran-bantaran sungai. Setelah muncul masalah itu, pemerintah mulai memperbanyak hunian, yang dulunya lahan kosong atau lahan pertanian berubah menjadi kawasan terbangun. Alih-alih menyelesaikan masalah lonjakan demografi, justru masalah banjir yang datang, karena banyak wilayah resapan air berubah menjadi kawasan terbangun, luas wilayah Surabaya pada 1986 mencapai 29.176 hektar, lebih dari separuh yakni 52,51 persen telah menjadi wilayah terbangun, sisanya 13.851 hektar atau 47,49 persen digunakan untuk kegiatan pertanian, tambak, dan garam rakyat. Perubahan fungsi lahan mulai masif tahun 1950-an sampai 1990-an.

Selanjutnya bagian kelima berbicara mengenai degradasi lingkungan perkotaan yang disebabkan oleh ketidakstabilan demografi dan berakibat pada pemukim liar yang hidup di bantaran sungai, saluran drainase, dan kolong jembatan, para pemukim liar (gelandangan) tidak memiliki tempat tinggal tetap, mereka membangun rumah dari bahan seadanya, seperti kayu bekas proyek atau kardus bekas industri. Masalah gelandangan sudah ada sejak periode kolonial yakni pada Januari 1924, setiap malam polisi menangkap sekitar 10-20 orang untuk dikembalikan ke tempat asalnya, akan tetapi, usaha itu kurang maksimal, karena di tempat asalnya, mereka tidak memiliki pekerjaan, sehingga kembali lagi ke kota dengan pencari pekerjaan seadanya, masalah ini tetap berlanjut sampai pasca kedaulatan

Indonesia. Memasuki tahun 1970-an, pemukiman liar semakin menjamur di bantaran sungai, hal ini menimbulkan masalah baru yakni sampah yang dibuang ke sungai. Sungai-sungai mengalami pendangkalan karena banyaknya sampah yang memenuhinya, para pemukim liar membuang sampahnya ke sungai, sehingga menyumbat aliran dan menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Menyadari masalah ini, Pemerintah Kolonial membuat aturan kebersihan dan mewajibkan masyarakat membuang sampah ke bak sampah serta melarang membuang sampah ke sungai. Prihatin dengan masalah sampah, pada 1960-an muncul gerakan untuk mengurus dan mengendalikan sampah di Surabaya. Pembukaan lahan besar-besaran mengakibatkan semakin sedikitnya ruang terbuka hijau, kesadaran dalam merawat ruang terbuka hijau yang mulai kritis baru muncul tahun 1970-an, Pemerintah Surabaya mulai memetakan wilayah untuk ruang terbuka hijau dan wilayah untuk pemukiman.

Bagian terakhir membicarakan tentang upaya pengendalian banjir oleh pemerintah dan masyarakat yakni dengan membuat *master plan* pembangunan di Surabaya, memetakan wilayah untuk area terbangun dan area terbuka hijau, hal itu dibuktikan dari ucapan Walikota Surabaya R. Soekotjo tahun 1968, bahwa perlunya menerapkan *master plan* dalam pembangunan jangka panjang di Surabaya, gagasan itu masih berlanjut sampai tahun 2000-an. Selain itu, Pemerintah Kolonial sudah mengantisipasi banjir kiriman dengan membangun Bendungan Lengkong, Porong, dan Kanal Wonokromo. Setelah terbangunnya fasilitas pengendalian banjir kiriman yang mampu menghalau banjir dari dataran tinggi, masalah banjir karena hujan, perubahan fungsi lahan, dan sedimentasi sungai belum terselesaikan. Maka dari itu, pada awal abad ke-20 dibangun dam, pintu air, dan *bozem* untuk mengendalikan banjir dari masalah lingkungan di Surabaya sendiri. Upaya pembuatan fasilitas pengendali banjir dirasa masih efektif pada pasca kedaulatan Indonesia, terlihat dari tahun 1953, ada pembangunan *bozem* baru di daerah Wiyung. Normalisasi sungai dan perbaikan drainase dilakukan dari periode kolonial sampai republik, pengurukan serta membangun fasilitas pompa air di kawasan yang rendah. Kesungguhan pemerintah republik dalam menormalisasi sungai yakni terbukti dari terbentuknya Proyek Brantas tahun 1960 untuk menangani luapan air pada musim hujan setiap tahunnya. Selanjutnya upaya masyarakat dalam mengendalikan banjir yaitu membangun rumah berlantai dua untuk menghindari banjir ketika musim hujan tiba, upaya ini lebih pada masyarakat kaya dan memiliki modal untuk membangun rumah bertingkat. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki cukup uang, mereka membangun tanggul-tanggul kecil di depan rumah dan menyedot air di dalam rumah dengan pompa air kecil, gotong royong diterapkan oleh masyarakat menengah kebawah untuk menguruk tanggul sungai yang jebol dan membersihkan sisa lumpur di jalan.

Poin penting dalam buku ini yakni, meski sudah dilakukan berbagai upaya untuk memperbaiki ekologi Kota Surabaya dan pembangunan fasilitas untuk mengendalikan banjir, tetapi upaya itu hanya mampu mengurangi sebagian kecil bencana banjir yang terjadi. Kegagalan pemerintah dalam mengelola lingkungan perkotaan dipicu oleh faktor ekonomi yang tidak stabil tahun 1930-an, disusul pasca kedaulatan Indonesia dan diperparah revolusi kemerdekaan. Faktor politik 1960-an juga memberikan pengaruh yang serius pada pengendalian banjir, Pemerintah Surabaya kurang memperhatikan kondisi lingkungan kota,

melainkan terfokus pada peristiwa pergolakan politik tahun itu. Telatnya kesadaran pemerintah terhadap ruang terbuka hijau juga memberikan dampak serius terhadap bencana banjir yang terjadi, pemerintah baru sadar ketika ruang terbuka hijau di Surabaya sudah kritis. Maka dari itu, bencana banjir di Surabaya sampai sekarang masih kerap terjadi.

Buku ini terfokus pada narasi banjir kiriman dan banjir lokal, ada sebagian poin penting kurang terurai, seperti banjir yang disebabkan oleh pasang surut air laut (banjir rob), padahal Surabaya memiliki wilayah pantai yang luas, tetapi naras-narasi banjir rob kurang tersampaikan pada karya ini, mungkin keterbatasan sumber atau kurangnya perhatian oleh penulis. Aspek lain yang kurang tersentuh yaitu erosi pantai, sedikit sekali narasi tentang erosi pantai, padahal penting melihat proses perubahan lingkungan di pantai, karena dengan terjadinya erosi di pantai, bisa menyebabkan semakin masifnya banjir rob terjadi. Kedua aspek ini mampu digunakan sebagai topik penelitian baru bagi peneliti-peneliti berikutnya.

Spasial pada penelitian ini berlokasi di kota besar Indonesia yakni Surabaya, padahal realitanya banjir juga terjadi di kota-kota kecil seperti Gresik, Sidoarjo, dan Lamongan. Sarkawi B. Husain sudah memberikan contoh konsep kajian sejarah lingkungan dengan mengambil tema banjir di kota besar, sehingga mampu dirujuk para peneliti yang akan menulis sejarah banjir di kota-kota lain. Semoga buku ini bisa menjadi refleksi sejarahwan-sejarahwan muda untuk menelusuri peristiwa banjir di kota-kota kecil. Serta memperbanyak historiografi lingkungan tentang bencana banjir di Indonesia.